



PERATURAN KEPALA DESA

PERATURAN KEPALA DESA LIMBANGAN

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2026

**DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO**



KEPALA DESA LIMBANGAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA LIMBANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LIMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Limbangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Limbangan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mendorong Kemandirian Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koprasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
22. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025

Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;

27. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
28. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 9 Januari 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12);
 33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 35. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 36. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
 37. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 38. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 39. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 99 Nomor 2022) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor

- 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 28);
40. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
41. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 55);
42. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 56);
43. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 58);
44. Peraturan Desa Limbangan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Desa Limbangan (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2016 Nomor 6);
45. Peraturan Desa Limbangan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2019 Nomor 3);
46. Peraturan Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Limbangan Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 1);
47. Peraturan Desa Limbangan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Limbangan Tahun 2026 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2025 Nomor 4);
48. Peraturan Desa Limbangan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Limbangan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2025 Nomor 6);

49. Peraturan Desa Limbangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LIMBANGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 1.026.163.250,-, (satu milyar dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 2.305.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 1.021.858.250,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 2.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 1.026.163.250,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 503.382.053,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 688.987.972,00
c. Bidang Pembinaan Kcmasyarakat Desa	Rp 24.265.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 40.002.300,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 14.305.028,00
Jumlah Belanja	Rp 1.270.942.353,00
Surplus/Defisit	Rp (244.779.103,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 293.979.103,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 49.200.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 244.779.103,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Limbangan.

Ditetapkan di Limbangan

Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA LIMBANGAN,



Diundangkan di Limbangan

Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA LIMBANGAN



BERITA DESA LIMBANGAN TAHUN 2025 NOMOR 5

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LIMBANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	7
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			2.305.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			2.305.000,00	
4.1.4.00	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			2.305.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.021.658.250,00	
4.2.1.	Dana Desa			301.493.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			301.493.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			70.556.250,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			70.556.250,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			349.809.000,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			349.809.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			300.000.000,00	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			300.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.000.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank			2.000.000,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			1.026.163.250,00	
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			503.382.053,00	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Silkap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			415.111.899,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai		bulan	58.200.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			58.200.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			58.200.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			52.200.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		BULAN	6.000.000,00	
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			219.600.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			219.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			219.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			201.600.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		tahun	18.000.000,00	
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			17.559.360,00	PBH
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			17.559.360,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			3.531.680,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			13.927.680,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian		paket	43.912.539,00	ADD, DLL, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			43.912.539,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.276.649,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.212.099,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.064.550,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			27.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			19.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.029.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.100.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			899.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			1.020.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.680.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.300.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			30.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.606.890,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.970.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.636.890,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD			25.350.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai		bulan	25.350.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			25.350.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			23.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			1.950.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			32.160.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		paket	32.160.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			32.160.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			32.160.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	paket	9.000.000,00	DOS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.000.000,00	
1.01.90.		Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa			4.830.000,00	PEH
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		paket	4.830.000,00	
1.01.90.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.830.000,00	
1.01.90.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			4.830.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.91.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.01.91. 5.1.	Belanja Pegawai		paket	4.500.000,00	ADD
1.01.91. 5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			4.500.000,00	
1.01.91. 5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sali			4.500.000,00	
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			8.070.154,00	
1.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Paket	8.070.154,00	ADD
1.02.01. 5.3.	Belanja Modal			8.070.154,00	
1.02.01. 5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			8.070.154,00	
1.02.01. 5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			8.070.154,00	
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			3.400.000,00	
1.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	Paket	1.000.000,00	DDS
1.03.02. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
1.03.02. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
1.03.02. 5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
1.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	paket	2.400.000,00	DDS
1.03.05. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00	
1.03.05. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
1.03.05. 5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			73.200.000,00	
1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Paket	6.300.000,00	DDS
1.04.01. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.300.000,00	
1.04.01. 5.2.1.	Belanja Barang Penghimpunan			6.300.000,00	
1.04.01. 5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.04.01. 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.800.000,00	
1.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)		Paket	9.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.500.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			9.500.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.500.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)		paket	2.400.000,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
1.04.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa		paket	5.000.000,00	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
1.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
1.04.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.000.000,00	
1.04.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			2.000.000,00	
1.04.10.		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkadaes, Penyerangan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan		paket	50.000.000,00	ADD
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.000.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			30.500.000,00	
1.04.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.000.000,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.500.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.000.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.500.000,00	
1.04.10.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			16.500.000,00	
1.04.10.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
1.04.10.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan			3.000.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanian			3.600.000,00	
1.05.06.		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			3.600.000,00	ADD
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		paket	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.05.06.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
1.05.06.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
1.05.06.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			600.000,00	
1.05.06.5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			600.000,00	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			668.987.972,00	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			52.200.000,00	
2.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honorer, Pskalan dll)	1	paket	52.200.000,00	DDS
2.01.01.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			52.200.000,00	
2.01.01.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			52.200.000,00	
2.01.01.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			52.200.000,00	
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			49.900.000,00	
2.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	paket	8.300.000,00	DDS
2.02.01.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.300.000,00	
2.02.01.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.300.000,00	
2.02.01.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.300.000,00	
2.02.01.5.3.	Belanja Modal			2.000.000,00	
2.02.01.5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.000.000,00	
2.02.01.5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			2.000.000,00	
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	paket	25.800.000,00	DDS
2.02.02.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.800.000,00	
2.02.02.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.200.000,00	
2.02.02.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.200.000,00	
2.02.02.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.600.000,00	
2.02.02.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.600.000,00	
2.02.90.	Penyelenggaraan POSBINDU	1	paket	14.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.000.000,00	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			14.000.000,00	
2.02.90.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			14.000.000,00	
2.02.92.		Pencegahan dan Penurunan Stunting	1	paket	1.800.000,00	DDS
2.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.800.000,00	
2.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
2.02.92.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			1.800.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			345.000.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)			300.000.000,00	PBP
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			300.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			300.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			51.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			231.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			9.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			9.000.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	1	paket	45.000.000,00	DDS
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			45.000.000,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			45.000.000,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			15.000.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			27.000.000,00	
2.03.12.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			2.000.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Permukiman			235.000.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni QAKIN	1	paket	230.000.000,00	DDS, PBP
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			230.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.04.01.	5.3.4.			230.000.000,00	
2.04.01.	5.3.4.02			22.000.000,00	
2.04.01.	5.3.4.03			205.800.000,00	
2.04.01.	5.3.4.05			2.200.000,00	
2.04.07.		1	paket	6.000.000,00	DDS
2.04.07.	5.2			6.000.000,00	
2.04.07.	5.2.1.			1.000.000,00	
2.04.07.	5.2.1.04			1.000.000,00	
2.04.07.	5.2.6.			5.000.000,00	
2.04.07.	5.2.6.02			5.000.000,00	
02.06.				5.887.972,00	
2.06.02.		1	paket	5.887.972,00	DDS
2.06.02.	5.2			5.887.972,00	
2.06.02.	5.2.1.			487.972,00	
2.06.02.	5.2.1.08			487.972,00	
2.06.02.	5.2.2.			5.400.000,00	
2.06.02.	5.2.2.05			5.400.000,00	
03				24.255.000,00	
03.01.				10.800.000,00	
3.01.01.				10.800.000,00	PSH
3.01.01.	5.2			10.800.000,00	
3.01.01.	5.2.2.			10.800.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05			10.800.000,00	
03.02.				2.305.000,00	
3.02.03.		1	paket	2.305.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.305.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.305.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			305.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			11.160.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK		paket	11.160.000,00	PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.160.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.160.000,00	
3.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			11.160.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			40.002.300,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			10.800.000,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Sahuran Irigasi Tersier/Sederhana			10.800.000,00	DDS
4.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.800.000,00	
4.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.800.000,00	
4.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			10.800.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			4.202.300,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	paket	4.202.300,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.202.300,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.202.300,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			202.300,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			25.000.000,00	
4.05.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1	paket	25.000.000,00	DDS
4.05.02.	5.3.	Belanja Modal			25.000.000,00	
4.05.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			25.000.000,00	
4.05.02.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.05.02.	5.3.4.02			3.000.000,00	
4.05.02.	5.3.4.04			20.000.000,00	
4.05.02.	5.3.4.05			1.500.000,00	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA			14.305.028,00	
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			3.505.028,00	
5.01.00.	Penanggulangan Bencana	1	paket	3.505.028,00	DDS
5.01.00.	5.4.			3.505.028,00	
5.01.00.	5.4.1.			3.505.028,00	
5.01.00.	5.4.1.01			3.505.028,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			10.800.000,00	
5.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	1	paket	10.800.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.			10.800.000,00	
5.03.00.	5.4.1.			10.800.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01			10.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA			1.270.942.353,00	
	SURPLUS DEFISIT			(244.779.103,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			293.979.103,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			243.979.103,00	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			243.979.103,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan			50.000.000,00	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan			50.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			49.200.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa			49.200.000,00	
6.2.2.01	Penyerahan Modal Desa			49.200.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			244.779.103,00	

Case No.	Age	Sex	Occupation	Duration of Illness	Site of Lesion	Microscopic Findings	Diagnosis
1	45	M	Teacher	3 months	Right lung	Granulomatous inflammation with caseation	Tuberculosis
2	60	F	Homemaker	6 months	Left lung	Granulomatous inflammation with caseation	Tuberculosis
3	35	M	Farmer	1 year	Right lung	Granulomatous inflammation with caseation	Tuberculosis
4	55	F	Teacher	4 months	Left lung	Granulomatous inflammation with caseation	Tuberculosis
5	40	M	Engineer	2 months	Right lung	Granulomatous inflammation with caseation	Tuberculosis

with a full day of treatment 2012

www.elsevier.com/locate/jmb

Signature

© 2000 Blackwell Science Ltd